

12 JAM SAAT MALAM PERGANTIAN TAHUN

Pansus Rekomendasikan Penutupan Tugu-Titik Nol

YOGYA (KR) - Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya merekomendasikan penutupan area Tugu hingga Titik Nol Kilometer pada malam pergantian tahun. Terutama selama 12 jam mulai 31 Desember 2020 pukul 18.00 hingga 1 Januari 2021 pukul 06.00 WIB.

Rekomendasi tersebut dibacakan secara khusus dalam sidang paripurna yang digelar Senin (28/12). "Seperti kita pahami bersama setiap malam pergantian tahun di kawasan Tugu sampai Titik Nol Kilometer selalu menjadi pusat keramaian. Itu potensi di depan mata dan berpotensi menjadi klaster baru," tandas Fokki Ardiyanto, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta.

Penutupan itu pun tidak berlangsung permanen serta hanya bagi pengunjung. Sedangkan warga setempat tetap diberikan akses masuk, begitu pula terhadap tamu hotel yang ada di kawasan itu. Penutupan akses itu pun cukup dengan menyiagakan petugas dari unsur Sat Pol PP, kepolisian maupun TNI.

Fokki mengaku, pihaknya khawatir jika terjadi penularan kasus Covid-19 di pusat keramaian. Pasalnya, petugas akan kesulitan melakukan penelusuran dan pengendalian, apalagi fasilitas layanan kesehatan juga kemampuannya semakin terbatas seiring penambahan kasus yang tinggi. "Ini sebagai bentukantisipasi karena kalau sampai terjadi ledakan maka petugas tidak akan mampu me-

ngendalikan," urainya.

Selain penutupan secara terbatas di area Tugu hingga Titik Nol Kilometer, sejumlah rekomendasi juga turut diberikan oleh pansus. Di antaranya menambah anggaran sosialisasi, pengadaan mobil PCR untuk mempercepat swab, tes massal dengan anggaran negara, pemberian insentif bagi petugas operasional, dan lainnya.

Sementara Ketua Hariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku akan mengkaji seluruh rekomendasi yang diberikan pansus tersebut. Khusus penutupan area Tugu hingga Titik Nol Kilometer sejauh ini memang belum dijadikan pilihan. Pengaturan arus di sana juga telah dikoordinasikan bersama jajaran kepolisian. "Ibarat balon, jika satu ditutup maka kawasan lain akan menggelembung atau keramaian berpindah," katanya.

Di samping itu, pihaknya juga meyakini sebagian besar warga luar daerah yang datang ke Yogya sudah membekali diri dengan rapid test antigen dan dalam kondisi sehat. Akan tetapi pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta meminimalisasi potensi penyebaran virus. Justru

yang perlu diperketat saat ini ialah operasi yustisi serta penegakan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. "Tetapi apa yang direkomendasikan oleh pansus tetap akan kami kaji," tandasnya.

Sementara itu peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif Wisnadi mengatakan, pembukaan jalan kawasan Malioboro untuk kendaraan selama Nataru memang dilematis. Satu sisi memberikan kesempatan tumbuhnya ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya klaster Nataru.

"Kebijakan membuka kembali Malioboro untuk kendaraan bermotor lebih pada upaya mencegah agar seseorang tidak menularkan. Dalam hal ini kendaraan yang digunakan untuk masuk ke kawasan akan dapat menjadi penghalang fisik untuk para pengunjung berkerumun terlalu dekat," katanya, Senin (28/12).

Menurut Arif, pencegahan timbulnya kerumunan dapat melindungi agar orang tidak tertular, dan juga mencegah agar tidak menularkan. Namun demikian dengan masuknya kendaraan di wilayah Malioboro, ada konsekuensi ruang untuk manusia akan berkurang. Jika pengunjung bertambah sementara ruang untuk berkumpul berkurang maka kondisi berdesakan akan lebih dirasakan. Untuk itu penerapan protokol kesehatan

khususnya physical distancing harus ditegakkan. "Apabila jumlah petugas ti-

dak cukup dan pengunjung tetap bertambah, maka perlu ada kebijakan buka tutup.

Sistem buka tutup akan bisa mengendalikan kepadatan orang di dalam kawasan, na-

mun berimplikasi pada kelancaran arus kendaraan," ungkapnya. **(Dhi/Ria)-d**

UNDI HADIAH GEBYAR HUT KE-9, APRESIASI PENGGERAK KEMANUSIAAN DPD Partai NasDem Kota Yogya Inovatif



KR-Ardhi Wahdan

Penyerahan potongan tumpeng oleh Sigit Wicaksono kepada H Subardi.

YOGYA (KR) - DPD Partai NasDem Kota Yogya dinilai inovatif dalam menyemarakkan HUT ke-9 tahun di tengah masa pandemi Covid-19. Meski harus menghindari kegiatan yang mengundang kerumunan, namun tidak menyurutkan kebersamaan yang terbangun.

Hal itu diungkapkan Ketua DPW Partai NasDem DIY H Subardi di sela pengundian hadiah gebyar HUT ke-9 di Sekretariat DPD Partai NasDem Kota Yogya, Minggu (27/12). Kegiatan itu dilakukan dengan undangan terbatas serta digelar secara virtual melalui media sosial Facebook dan Instagram.

"DPD Kota ini inovatif, kreatif, produktif dan ekonomis. Sesuai tema sekarang di mana pandemi tidak boleh kumpul-kumpul dan kita komitmen agar Covid-19 jangan terus berkembang sehingga protokol kesehatan selalu dikedepankan," urainya.

Subardi pun berharap kegiatan gebyar kemarin bukan untuk menutup rangkaian HUT ke-9 melainkan akan terus berlanjut hingga jelang ulang tahun berikutnya. Di samping itu pemberian apresiasi kepada kader maupun penggerak kemanusiaan juga patut diacungi jempol. Pasalnya, apresiasi itu tidak dalam rangka jelang agenda poli-

tik sehingga menunjukkan keaktifan dan dinamika DPD Partai NasDem Kota Yogya dalam member-samai masyarakat.

"Untuk kota terulah bergerak mengedepankan solidaritas, kreativitas dan inovasi. NasDem kota sudah memberikan peran, memberikan arti dan memberikan *wicaksana* yakni cerdas dalam mengambil keputusan," tandasnya.

Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kota Yogya Sigit Wicaksono, mengaku perlu memberikan apresiasi kepada kader yang selama ini ikut berjuang. Pada pileg sebelumnya hanya mampu menempatkan satu orang, namun kini dapat mewakili empat

orang di kursi DPRD Kota Yogya. Begitu pula bagi penggerak kemanusiaan di tengah pandemi juga perlu diberikan penghargaan. "Sumbangsih kita meski belum seberapa namun semoga mampu memberikan semangat dan ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya," akunya.

Terdapat 9 penggerak kemanusiaan yang diberikan apresiasi. Masing-masing ialah Sukirman (kampung sayur), Kelompok Koplak Pakuncen (kemanusiaan lingkungan di Wirobrajan), Prasetyo Eko Putro dan Susanto (kegawatdaruratan), Margono (inisiator se-dekah cinta di Jetis), Wami (perajin UMKM), Muharom Sidig (jaringan KTB Mangkuyudan), Rudiyanto (penyempotan se-Kotagede), dan Martono (pemuda peduli kemanusiaan di Tamansiswa).

Sementara terdapat 9 kader yang beruntung dalam pengundian hadiah gebyar HUT. Masing-masing Harjono dan Dewi Rosaniawati (kompor gas), Yuniwigati dan Mustini (handphone), Ratna Setyowati (mesin cuci), Hj Markonah dan Endang Kartingsih (sepeda lipat), Wawan Nugroho (kulkas), dan Marwiyah (sepeda motor).

(Dhi)-d

BELUM DIREKOMENDASIKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA Semester Genap Masih Gunakan Sistem Daring

YOGYA (KR) - Dinas Pendidikan Kota Yogya memastikan pada pembelajaran semester genap yang dimulai 4 Januari 2021, masih akan menerapkan sistem daring. Pembelajaran tatap muka sejauh ini belum direkomendasikan mengingat kasus Covid-19 masih tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan kebijakan itu ditempuh atas pertimbangan keamanan dan kesehatan siswa, guru, karyawan maupun orangtua.

"Kondisi sekarang masih begini sehingga berisiko kalau tatap muka. Ini siswa masih pada libur, begitu masuk semester genap akan tetap daring," jelasnya, Senin (28/12).

Sejauh ini seluruh sekolah memang sudah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan satgas di tingkat kota hingga wilayah. Dari aspek regulasi serta kesiapan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka juga tidak ada persoalan.

Akan tetapi untuk benar-benar menggelar tatap muka tidak bisa mengesampingkan kondisi faktual. "Bisa dibayangkan, total

siswa di Kota Yogya dari jenjang SD sampai SMA itu saja sudah lebih dari 100.000 orang. Belum nanti jumlah guru dan orangtua yang mengantar serta menjemput. Aktivitas pertemuan orang akan meningkat. Makanya lebih baik menahan dulu sampai nanti bisa dikendalikan," imbuhnya.

Akan tetapi bagi anak didik yang tidak memiliki perangkat untuk mendukung pembelajaran daring, tetap dipersilakan hadir ke sekolah. Namun kehadirannya hanya mengambil tugas untuk dibawa pulang dan dipelajari di rumah.

Budi mengaku, proses pembelajaran daring sudah bergulir selama sepuluh bulan. Target kurikulum pun sudah disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Selama daring, diakuinya target kurikulum normal hanya bisa tercapai sekitar 70 persen. Tetapi dengan penyederhanaan kurikulum harapannya semua materi bisa tersampaikan.

Di samping itu, Budi juga berharap bantuan kuota data internet masih bisa diberikan mulai tahun 2021. Pasalnya, bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sementara hanya sampai Desember 2020. **(Dhi)-d**

Kaleidoskop Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY di Pengujung 2020



KR-Istimewa

Pemasangan plang penertiban bangunan pada sempadan sungai

YOGYA (KR) - Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas PTR DIY mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas PTR DIY mempunyai beberapa fungsi, antara lain fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam melaksanakan tugas untuk urusan bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1

Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, DPTR DIY telah melakukan penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Kalurahan yang berada di wilayah DIY," kata Kepala Dinas PTR DIY Krido Suprayitno, Senin (28/12).

Dijelaskan, hingga akhir 2020 sebanyak 14.044 bidang telah diinventarisasi dengan rincian Kota Yogyakarta 506 bidang, Bantul 3.432 bidang, Kulonprogo 1.574 bidang, Gunungkidul 4.046 bidang dan Sleman 4.486 bidang. Dari jumlah tersebut, yang sudah didaftarkan untuk diterbitkan sertipikat se-

banyak 12.390. Untuk 7.214 telah terbit sertipikatnya meliputi Kota Yogyakarta 440 sertipikat, Bantul 2.286 sertipikat, Kulonprogo 993 sertipikat, Gunungkidul 1.860 sertipikat, dan Sleman 1.635 sertipikat.

"Berdasar Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 dalam rangka pemanfaatan Tanah Desa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa. DPTR DIY telah memfasilitasi dengan pemberian pedoman yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa," jelasnya.

Hingga Desember 2020, Pemerintah Kalurahan yang sudah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah

Kalurahan sebanyak 275 dengan rincian Bantul 43 dari 75 Kalurahan, Kulonprogo 87 dari 87 Kalurahan, Gunungkidul 94 dari 144 Kalurahan dan Sleman 51 dari 86 Kalurahan. Sehingga Peraturan Desa tersebut dapat digunakan sebagai acuan pengawasan pemanfaatan Tanah Desa.

Sementara urusan bidang tata ruang, telah dilakukan proses rekomendasi Gubernur terhadap rencana tata ruang kabupaten/kota dan tindakan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY. Selama tahun 2020, Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang telah melaksanakan fungsinya dalam penyediaan bahan rekomendasi Gubernur untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Kabupaten/Kota. Rekomendasi Gubernur untuk revisi RTRW Kota Yogyakarta, revisi RTRW Kabupaten Sleman, revisi RTRW Kabupaten Kulonprogo sudah terbit. Di sisi lain, Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan upaya penertiban pemanfaatan ruang selama tahun 2020.

"Penertiban dilakukan pada beberapa bangunan yang diindikasikan tidak sesuai rencana tata ruangnya dan atau bangunan yang tidak berizin atau belum lengkap izinnya. Upaya penertiban tersebut ditandai pemasangan plang penertiban sebagai tindak lanjut dari audit tata ruang," ucap Krido. **(Feb)-d**



PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI (DIREKTUR TEKNIK) PDAM TIRTA HANDAYANI

Persyaratan Peserta:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berijazah paling rendah S-1
3. Berusia paling rendah 35 tahun paling tinggi 55 tahun
4. Untuk kelengkapan syarat lainnya dapat dilihat pada laman dan instagram di bawah

Lamaran Ditujukan Kepada
Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi (Direktur Teknik)
PDAM Tirta Handayani Tahun 2020

d/a : Sekretariat Panitia Seleksi
Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
Setda Kabupaten Gunungkidul
Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Telp. 0274-391006
Tanggal : 29 Desember 2020 s.d 7 Januari 2021
pada jam kerja

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di

www.gunungkidulkab.go.id

@pemkabgunungkidul

www.pdamgunungkidul.com

@pdam_tirta_handayani_gk